

## BAB II

### DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### 2.1. Teori Kegunaan Informasi (*Decision-Usefulness Theory*)

Penelitian ini menggunakan teori kegunaan informasi (*decision-usefulness theory*). Staubus (2000) dalam Kiswara (2011) menyatakan teori kegunaan keputusan (*decision-usefulness theory*) informasi akuntansi menjadi referensi dari penyusunan kerangka konseptual *Financial Accounting Standard Boards (FASB)*, yaitu *Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC)* yang berlaku di Amerika Serikat. Pada tahap awal, teori ini dikenal dengan nama lain yaitu *a theory of accounting to investors*. Selain FASB, ada sebuah badan yang setara dengan FASB yaitu GASB. GASB bertanggungjawab untuk menetapkan standar akuntansi untuk aktivitas dan transaksi dari pemerintah pusat dan daerah, sedangkan FASB menyusun standar akuntansi untuk semua organisasi lainnya termasuk non pemerintahan dan organisasi non profit (Freeman and Shoulder, 2008).

Teori kegunaan-keputusan informasi akuntansi harus mengandung komponen-komponen yang mesti dipertimbangkan oleh para penyaji informasi akuntansi agar dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan dalam mengambil keputusan ekonomi. SFAC No. 2 tentang *Qualitative Characteristics of Accounting Information* menggambarkan hirarki dari kualitas informasi akuntansi dalam bentuk kualitas primer, kandungannya dan kualitas sekunder. Kualitas primer dari informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi adalah nilai relevan (*relevance*) dan

reliabilitas (*reliability*). FASB menyatakan bahwa nilai relevan dan reliabilitas adalah dua kualitas utama yang membuat informasi akuntansi berguna dalam pengambilan keputusan. Nilai relevan diklasifikasikan sebagai kapasitas informasi untuk membuat suatu perbedaan dalam pengambilan keputusan oleh pemakai sedangkan reliabilitas didefinisikan sebagai kualitas pemberian jaminan bahwa informasi itu secara rasional bebas dari kesalahan dan bias, dan mewakili apa yang akan digambarkan. FASB menyatakan bahwa agar menjadi relevan bagi investor, kreditur, dan yang lain dalam rangka investasi, kredit dan keputusan sejenis maka informasi akuntansi harus memiliki kapabilitas untuk membuat suatu perbedaan pada suatu keputusan. Hal tersebut ditempuh dengan cara membantu pemakai dalam membentuk prediksi tentang hasil dari kejadian masa lalu, sekarang, dan yang akan datang atau untuk mengkonfirmasi atau membenarkan harapannya.

Kandungan kualitas primer kegunaan-keputusan informasi akuntansi meliputi komponen-komponen kandungan dari nilai relevan, yaitu ketepatanwaktuan (*timeliness*), nilai umpan balik (*feed-back value*), dan nilai prediktif (*predictive value*), dan komponen-komponen kandungan reliabilitas, yaitu penggambaran yang senyatanya (*representational faithfulness*), netralitas (*neutrality*), dan dapat diperiksa (*verifiability*). Selain itu juga terdapat kualitas sekunder, sebagai penghubung antara kualitas primer, yaitu komparabilitas (*comparability*) dan taat asas (*consistency*) (Pakarta, 2015).

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang terkandung dalam Undang-Undang No. 71 Tahun 2010 mengadopsi karakteristik kualitatif sebagaimana

tercantum dalam SFAC No. 2. Hanya saja SAP menekankan pada empat prasyarat normatif yakni: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

## **2.2. Pemerintah Daerah**

Berdasarkan pasal 18 ayat (5) UUD 1945, pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang diatur oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 adalah:

1. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.
3. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. Di mana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan khususnya pemerintah daerah, sangat berkaitan erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu negara, yakni sebagai berikut:

1. Asas desentralisasi

Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan alam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2. Asas dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertikal wilayah tertentu.

3. Asas tugas pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada kepala daerah dan/atau desa; dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau desa; serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk tugas tertentu.

### **2.3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam

membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (Lillarnk, 2003).

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yakni relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah hasil dari proses akuntansi keuangan pemerintah daerah yang berisi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan untuk digunakan oleh pihak-pihak eksternal yang berkepentingan.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010, secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik, dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;

3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit LO, aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan laporan keuangan pemerintah, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

#### 2.4. Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, menjelaskan karakteristik-karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

##### 1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan:

##### a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

##### b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.



b. Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak beda jauh.

c. Netralitas

Informasi yang diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan

memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

## **2.5. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan ....Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Mahsun *et al* (2012), informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pemakai. Oleh karena itu, pemerintah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.

Adapun faktor-faktor yang dapat menjelaskan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini yaitu kompetensi Sumber Daya manusia (SDM), pemanfaatan Teknologi Informasi (TI), dan sistem Pengendalian Intern (PI).

### **2.5.1. Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Widodo (2001) dalam Kharis (2010) menjelaskan kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Wiley (2002) dalam Azhar (2007) mendefinisikan

sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi, sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu organisasi harus memiliki daya kompetensi yang tinggi. Kompetensi sumber daya manusia merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2005). Kompetensi adalah salah satu karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada (Pakarta, 2015).

Selain daya kompetensi yang tinggi, sumber daya manusia juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan karena hal tersebut merupakan salah satu faktor penting untuk menilai kualitas sumber daya manusia yang efektif bagi suatu organisasi. Pengetahuan dan kemampuan merupakan sumber daya paling unik dan dapat diperbaharui yang dapat dimanfaatkan oleh suatu organisasi. Modal manusia

(*human capital*) atau lebih luas lagi, modal intelektual (*intelektual capital*), seringkali digunakan untuk menjelaskan nilai strategis dari pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia suatu organisasi (Beteman dan Scott, 2009). Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang memadai akan susah dalam mengerjakan pekerjaannya dan juga akan menyebabkan pemborosan bahan, waktu maupun tenaga dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi, kualitasnya menjadi buruk. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008).

### **2.5.2. Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Menurut Wilkinson *et al* (2000), pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal dari komputer, perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internert, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Teknologi informasi sangat membantu manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi untuk menjalankan sistem informasi komputer yang terintegrasi yang didesain untuk menyediakan data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan sumber daya manusia. Teknologi informasi dapat memungkinkan para atasan terhubung lebih baik dengan para karyawan dan lingkungan sekitar organisasi. Teknologi informasi juga

memiliki implikasi-implikasi yang positif untuk praktik manajemen, walaupun juga bisa menghadirkan berbagai masalah (Daft, 2008).

Dalam hubungannya dengan sistem informasi akuntansi, komputer akan meningkatkan kapabilitas sistem. Ketika komputer dan komponen-komponen yang berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan ke dalam suatu sistem informasi akuntansi, tidak ada aktivitas umum yang ditambah atau dikurangi. Sistem informasi tersebut mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data.

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintah bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya pengelolaan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik, dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar

pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat (Wilkinson *et al*, 2000).

### **2.5.3. Sistem Pengendalian Intern**

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mendefinisikan pengendalian intern adalah:

“Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.”

Pengendalian intern pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPI terdiri dari lima unsur antara lain lingkungan pengendalian, penilaian resiko, prosedur pengendalian, pemantauan, serta informasi dan komunikasi. Unsur-unsur dalam SPI menyajikan suatu pengendalian yang saling terkait dan dapat meyakinkan pengguna bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Menurut Mulyadi (2009) yang harus diterapkan dalam pengendalian intern agar dapat efektif dan berjalan dengan baik adalah:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya.
3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

SPI merupakan kegiatan pengendalian terutama atas pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi.

Kegiatan pengendalian atas pengelolaan informasi meliputi:

1. Pengendalian umum

Pengendalian ini meliputi pengamanan sistem informasi, pengendalian atas akses, pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi, pengendalian atas perangkat lunak sistem, pemisahan tugas, dan kontinuitas pelayanan.

2. Pengendalian aplikasi

Pengendalian ini meliputi pengendalian otorisasi, pengendalian kelengkapan, pengendalian akurasi, dan pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data.

SAS mendefinisikan lima komponen pengendalian intern yang saling berkaitan pada pernyataan COSO (Sawyer *et al.*, 2005) yaitu:

1. Lingkungan pengendalian (*Control environment*)

Lingkungan pengendalian menunjukkan atmosfir atau suasana (*sets the tone*) dalam suatu organisasi/perusahaan yang mempengaruhi kesadaran pengendalian (*control consciousness*) dari orang-orang dalam organisasi tersebut. Lingkungan pengendalian ini merupakan fondasi bagi komponen lainnya dan sangat dipengaruhi oleh suasana yang diciptakan dari atas atau *tone at the top*.

2. Penilaian risiko (*Risk assessment*)

Penilaian risiko merupakan mekanisme untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola berbagai risiko dalam organisasi dikaitkan dengan tujuan yang ingin dicapai.

3. Aktivitas pengendalian (*Control activities*)

Aktivitas pengendalian mencakup kebijakan dan prosedur untuk membantu meyakinkan bahwa semua tindakan dilaksanakan sesuai dengan arahan manajemen secara efektif.

4. Informasi dan komunikasi (*Information and communication*)

Sistem informasi dan komunikasi memungkinkan orang-orang dalam organisasi untuk memperoleh dan berbagi informasi yang diperlukan untuk mengelola, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan operasional.

5. Pengawasan (*Monitoring*)

Pengawasan merupakan proses penilaian terhadap kualitas dan efektivitas dari sistem pengendalian intern, termasuk modifikasi dan



penyempurnaannya apabila diperlukan. Terdapat hubungan langsung antara ketiga kategori tujuan yang harus dicapai dengan kelima komponen pengendalian intern (menunjukkan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan).

## **2.6. Kerangka Konseptual**

### **2.6.1. Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Havesi (2005) mengutarakan bahwa untuk mengoptimalkan tujuan organisasi harus memiliki daya kompetensi yang tinggi. Dalam pengelolaan keuangan pemerintah yang baik, satuan kerja harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Kegagalan sumber daya manusia dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008).

### **2.6.2. Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa menindaklanjuti

terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintah bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya pengelolaan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik, dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat (Wilkinson *et al*, 2000).

### **2.6.3. Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Informasi Laporan Informasi Laporan Keuangan**

Pengendalian intern pada Pemerintah Daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPI memadai apabila unsur-unsur dalam SPI menyajikan suatu pengendalian yang saling terkait dan dapat meyakinkan pengguna bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) lingkungan pengendalian yang diciptakan seharusnya menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan SPI. SPI didesain

untuk dapat mengenali apakah SPI telah memadai dan mampu mendeteksi adanya kelemahan. Kelemahan tersebut antara lain kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian anggaran pendapatan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern yang dijalankan dengan baik akan berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

#### **2.6.4. Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan**

Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik 2006 mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan adalah kompetensi sumber daya manusia yang melaksanakan dan berperan dalam proses akuntansi. Sehingga untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka kualitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting. Selain kompetensi, faktor lainnya adalah teknologi informasi. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Faktor lain yang juga berpengaruh adalah sistem pengendalian intern yang dapat mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan. Menurut Lubis (2014), ketiga variabel tersebut yakni kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian

intern mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan antara kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan kualitas informasi laporan keuangan.

## **2.7. Penelitian Terdahulu**

Choirunisah (2008) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan sistem akuntansi instansi studi pada KPPN Malang. Hasil penelitiannya menyatakan kemampuan sumber daya manusia dan organisasi tim berpengaruh positif terhadap kualitas informasi keuangan satuan kerja. Indriasari (2008) meneliti pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah secara signifikan, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah secara signifikan. Indriasari (2008) juga menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) meneliti pengaruh sumber daya manusia dan informasi teknologi pemanfaatan kehandalan dan ketepatan waktu

pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian internal akuntansi. Hasil penelitiannya menyatakan Sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, tetapi tidak signifikan terhadap ketepatanwaktuan. Pemanfaatan TI berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan dan ketepatanwaktuan.

Lubis (2014) meneliti analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Medan dengan variabel sumber daya manusia (SDM), pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern. Hasilnya menyatakan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif secara parsial dan simultan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Prakata (2015) meneliti analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Medan dengan variabel sumber daya manusia (SDM), Sistem Pengendalian Intern (SPI), faktor eksternal sebagai moderasi yang mempengaruhi SDM dan SPI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Hasilnya menyatakan kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan, sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan, faktor eksternal berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan, sedangkan faktor eksternal tidak memoderasi hubungan antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan, dan faktor

eksternal memoderasi hubungan antara sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi keuangan daerah.

**Tabel 2.1.**

**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

<b>Peneliti (tahun)</b>	<b>Judul</b>	<b>Variabel</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Choirunisah (2008)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan sistem akuntansi instansi	Kualitas informasi laporan keuangan SAI, kemampuan SDM, dukungan pimpinan dan alat, fasilitas, organisasi tim.	Sumber daya manusia dan organisasi tim berpengaruh positif terhadap kualitas informasi keuangan satuan kerja.
Indriasari (2008)	Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir).	Nilai informasi pelaporan keuangan pemda, sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi	Pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap nilai informasi laporan keuangan. Tetapi kapasitas SDM berpengaruh negatif.
Winidyaningrum dan Rahmawati (2010)	Pengaruh Sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian intern akuntansi (Studi	Keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemda, sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi	Sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, tetapi tidak signifikan terhadap ketepatanwaktuan. Pemanfaatan TI berpengaruh positif signifikan terhadap

	Empiris di Pemda Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten)		keterandalan pelaporan dan ketepatanwaktuan.
Lubis (2014)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan	Kualitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern	Kualitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif secara parsial dan simultan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.
Pakarta (2015)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan	Sumber daya manusia (SDM), Sistem Pengendalian Intern (SPI), faktor eksternal organisasi sebagai moderasi yang mempengaruhi SDM dan SPI	Sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap kualitas informasi laporan keuangan, sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan, faktor eksternal berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan, sedangkan faktor eksternal tidak memoderasi hubungan antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan, dan

			faktor eksternal memoderasi hubungan antara sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi keuangan daerah
--	--	--	--

Sumber: Penelitian terdahulu

## **2.8. Pengembangan Hipotesis**

### **2.8.1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan**

Hasil penelitian Choirunisah (2008) menyatakan kemampuan sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi keuangan satuan kerja. Tetapi hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Indriasari (2008) yang membuktikan bahwa kapasitas sumber daya tidak berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan dan keterandalan informasi laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Hilir provinsi Sumatera Selatan. Penelitian oleh Pakarta (2015) juga membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kota Medan. Namun Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) yang menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2014)



menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menunjukkan ketidakkonsistensian arah pengaruh antara negatif dan positif, namun Widodo (2001) dalam Kharis (2010) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Apabila sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi tidak mempunyai kualitas yang disyaratkan, maka akan menyebabkan hambatan dalam melaksanakan fungsi akuntansi, dan akhirnya membuat kualitas informasi akuntansi menjadi buruk. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis untuk penelitian ini yaitu:

H<sub>A1</sub> : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan

### **2.8.2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan**

Penelitian yang dilakukan oleh Indriasari (2008) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi nilai informasi keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) juga membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian oleh Lubis (2014) juga membuktikan bahwa pemanfaatan

teknologi informasi berpengaruh positif secara parsial terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah.

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintah bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya pengelolaan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik, dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat (Wilkinson *et al*, 2000).

Teknologi informasi sangat membantu manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi untuk menjalankan sistem informasi komputer yang terintegrasi yang didesain untuk menyediakan data dan informasi yang digunakan

dalam perencanaan dan pengambilan keputusan sumber daya manusia. Teknologi informasi dapat memungkinkan para atasan terhubung lebih baik dengan para karyawan dan lingkungan sekitar organisasi. Teknologi informasi juga memiliki implikasi-implikasi yang positif untuk praktik manajemen, walaupun juga bias menghadirkan berbagai masalah (Daft, 2008). Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

H<sub>A2</sub> : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan

### **2.8.3. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Informasi**

#### **.....Laporan Keuangan**

Hasil penelitian oleh Indriasari (2008) membuktikan secara empiris bahwa pengendalian intern akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap nilai laporan keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dengan ketepatanwaktuan dan keterandalan. Lubis (2014), dan Pakarta (2015) juga menyatakan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Menurut Mulyadi (2009) yang harus diterapkan dalam pengendalian intern agar dapat efektif dan berjalan dengan baik adalah:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya.
3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Lubis (2014) menjelaskan bahwa interaksi antara orang dan sistem serta implementasi sistem merupakan faktor penting yang mempengaruhi kualitas dari sebuah informasi. Keandalan sistem harus juga didukung oleh keandalan sumber daya manusia. Namun sistem yang sudah berjalan harus dikontrol agar tetap dapat berjalan baik. Pakarta (2015) menjelaskan pengendalian intern merupakan bagian dari manajemen resiko. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis untuk penelitian ini, yaitu :

H<sub>A3</sub>: Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

#### **2.8.4. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan**

Penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2014) membuktikan secara empiris bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan

Sistem Pengendalian Intren berpengaruh positif secara parsial dan simultan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Wiley (2002) dalam Azhar (2007) mendefinisikan Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintah bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya pengelolaan data, pengelolaan informasi sistem manajemen, dan proses kerja secara elektronik dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat (Wilkinson *et al*, 2000).

Faktor lain yang juga berpengaruh adalah sistem pengendalian intern yang dapat mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan. Pakarta (2015) menjelaskan pengendalian intern merupakan bagian dari manajemen resiko yang harus dilaksanakan oleh setiap lembaga atau organisasi untuk mencapai tujuan lembaga atau organisasi. Penerapan pengendalian intern yang memadai akan memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas atau keandalan laporan keuangan, serta akan meningkatkan kepercayaan *stakeholders*.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan antara kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan hipotesa:

$H_{A4}$  : Kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.